

ABSTRAK

ANALISIS PENGGUNAAN UPAYA PAKSA OLEH APARAT KEPOLISIAN YANG MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN (Studi di Kepolisian Daerah Lampung)

**Oleh
Indonesia Mayumi Azra**

Upaya paksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan instrumen penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, seringkali terjadi penyalahgunaan upaya paksa yang melampaui batas kewenangan, menyebabkan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data ialah studi kepustakaan dan studi lapangan, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Bidang Hukum Polda Lampung, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Advokat LBH PAHAM Cabang Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan dalam konteks penyidikan tindak pidana dalam kasus Agus Budiarto diduga mengalami kekerasan yang mengakibatkan kematian selama proses penyidikan. Pertanggungjawaban pidana atas penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan dihukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Polisi yang terlibat dapat dijerat dengan Pasal 170 atau Pasal 351 KUHP tergantung pada hasil penyidikan dan berpotensi dipecat atau dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Saran pada penelitian ini adalah peningkatan pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan melampaui batas kewenangan. Dan diharapkan upaya hukum terhadap kasus kematian Agus Budioarto dilanjutkan sampai pada proses pengadilan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Upaya, Kewenangan, Kepolisian, Batas

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE USE OF FORCE BY POLICE OFFICERS THAT EXCEED THE LIMITS OF AUTHORIZATION (Study at Lampung Regional Police)

**Oleh
Indonesia Mayumi Azra**

Coercive measures carried out by police officers are an important instrument in maintaining security and public order. However, there is often misuse of coercive measures that exceed the limits of authority, causing conflict and human rights violations. The problem in this research is how is the use of coercive measures by police officers who exceed the limits of their authority and what is the criminal responsibility for the use of coercive measures by police officers who exceed the limits of their authority.

The research method uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data collection method is literature study and field study, and the data analysis used is qualitative data analysis. The resource persons for this research consisted of Head of Unit III Investigation of the Lampung Regional Police, Legal Investigators of the Lampung Regional Police, Investigators from the General Criminal Investigation Directorate of the Lampung Regional Police, Advocates from LBH PAHAM Lampung Branch and Academics from the Faculty of Law, University of Lampung.

The research results show that the use of coercive measures by police officers that exceeded the limits of their authority in the context of investigating criminal acts in the Agus Budiarto case was suspected of experiencing violence which resulted in death during the investigation process. Criminal liability for the use of coercive measures by police officers that exceed the limits of their authority is punished in accordance with the Criminal Code. The police involved could be charged under Article 170 or Article 351 of the Criminal Code depending on the results of the investigation and could potentially be fired or subject to dishonorable discharge (PTDH).

The suggestion in this research is to increase internal and external supervision of police officers to prevent abuse of power and exceeding the limits of authority. And it is hoped that legal efforts in the case of Agus Budioarto's death will continue until the court process in accordance with the applicable laws and regulations.

Keywords: Coercive measures, Authority, Lampung Regional Police